

TINJAUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA BADAN PEMBINAAN HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (BABINKUM TNI) DAN ODITURAT MILITER (ODMIL) DALAM PENANGANAN PERKARA

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Setiap warga negara siapapun dia harus tunduk pada hukum ataupun peraturan yang sedang berlaku. Telah menjadi sifat alami manusia, dimana manusia cenderung lebih suka mengkesampingkan ataupun melanggar peraturan maupun hukum yang berlaku, baik itu secara sengaja maupun tidak. Untuk menjamin setiap warga negara dapat bertindak sesuai hukum yang berlaku, negara membutuhkan aparatur yang dapat ditugaskan untuk menegakan hukum dan peraturan yang tidak dijalani dan di taati oleh warga negara.

Tentara Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan TNI adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan yang ada. Tugas dan fungsi dari TNI adalah bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan

internasional.¹ Pada proses TNI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparaturnegara, para prajurit TNI dapat melakukan suatu pelanggaran atas peraturan maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh para prajuri TNI tersebut dapat di golongkan menjadi 2, yang pertama adalah pelanggaran ringan yang dapat di hukum dengan hukuman disiplin prajurit, yang kedua adalah pelanggaran berat yang telah masuk ke dalam tindakan pidana, dalam perkara ini negara membentuk suatu badan peradilan khusus yang disebut denngan Peradilan Militer, yang khusus menangani tindak pidana yang di lakukan oleh prajurit TNI.

Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.² Di dalam proses penanganan perkara dibentuklah badan atau aparaturn yang berfungsi pada saat beracara di peradilan ini, badan atau aparaturn beserta fungsi dan penugasannya adalah sebagai berikut :

- a. Komandan Satuan selaku atasan yang berhak menghukum (angkum)
Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan.

¹ Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

² Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

b. Oditur Militer

Pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik.

c. Hakim Militer

Pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan militer.

Di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, setiap aparatur yang terdapat di peradilan militer bergerak sesuai dengan apa yang telah di tugaskan di dalam Undang – Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Oditurat Militer atau yang lebih dikenal dengan ODMIL, adalah pejabat yang diberi wewenang wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dalam menjalankan tugasnya, dibentuklah Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat BABINKUM TNI. Tugas dan fungsi BABINKUM TNI untuk membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, penyelenggaraan Oditurat, dan Pemasyarakatan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer.³

³ Lampiran I Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005

B. Rumusan Masalah

Apakah bentuk hubungan, BABINKUM TNI dan ODMIL dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dibuat untuk membuat terang suatu permasalahan yang ada atau yang timbul di dalam masyarakat. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah.

Untuk mengetahui hubungan antara BABINKUM TNI dengan ODMIL dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, secara umum di bidang ilmu hukum dan khususnya di bidang perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat kelulusan dalam menempuh program studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, penulisan penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah wawasan penulis, secara khusus di bidang hubungan antara BABINKUM TNI dengan ODMIL.

b. Bagi Akademisi

Memberikan informasi bagi akademisi yang tertarik maupun yang membutuhkan, tentang adanya korelasi antara BABINKUM TNI dengan ODMIL di dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang ilmu hukum khususnya pengetahuan pada ilmu pidana militer yang berhubungan dengan BABINKUM TNI dengan ODMIL di dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI.

E. Batasan Konsep

1. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia

Menurut Lampiran I Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005 Pasal 1 Badan Pembinaan

Hukum Tentara Nasional Indonesia yang disingkat BABINKUM TNI adalah suatu Badan Pelaksana Pusat pada tingkat Markas Besar TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.

Di dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia terdapat berbagai Badan Pelaksana Pusat, yang salah satunya adalah Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. Babinkum TNI bertugas Membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditurat dan Pemasyarakatan Militer dalam lingkungan peradilan militer. Di dalam Lampiran I Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005 Pasal 1 Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Pasal 3 menyebutkan tentang Fungsi Utama BABINKUM TNI sebagai berikut :

- a. Pemberian dukungan Hukum dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.
- b. Penyelenggaraan penegakan hukum dan pembinaan hukum di lingkungan TNI.
- c. Penyelenggaraan penyuluhan hukum dan HAM di lingkungan TNI.
- d. Pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Badan / Instansi / Lembaga TNI, prajurit TNI, mantan prajurit TNI dan Keluarganya.
- e. Penyelenggaraan penelitian, pengkajian, evaluasi, pengembangan hukum dan HAM.

- f. Pembinaan organisasi administrasi dan finansial Oditurat dan pemasyarakatan militer.
- g. Penyelenggaraan pendidikan keahlian profesi Hakim, Oditur, Panitera dan pelaksana teknis pemasyarakatan militer.
- h. Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan dalam pembinaan organisasi, administrasi dan finansial Oditurat dan Pemasyarakatan militer.
- i. Penyelenggaraan koordinasi dengan Direktorat Hukum / Dinas Hukum Angkatan dalam pembinaan hukum dan pemberi direktif kepada Perwira Hukum Komando Utama Operasional TNI.
- j. Penyelenggaraan koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam pembinaan personel TNI yang bertugas pada Mahkamah Agung dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

2. Oditurat

Menurut UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 1 Ayat (7) adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Tugas Oditurat Militer (ODMIL) adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan TNI sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oditurat merupakan Penuntut pada Pengadilan Militer, susunan organisasi dan prosedur Oditurat ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Dalam daerah hukum Oditurat Militer dapat dibentuk unit pelaksanaan teknis sesuai kebutuhan, pembentukannya terutama didasarkan pada pertimbangan luas daerah hukum dan banyaknya perkara, guna kecepatan penyelesaian perkara dan pendekatan pelaksanaan hukum bagi satuan militer (Angkatan Bersenjata).⁴

3. Anggota TNI

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 2 butir c, Tentara Nasional yaitu, tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 21 Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf

⁴ Darwan Prinst, S.H., 2003, *Peradilan Militer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Angkatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁵

Tugas pokok TNI sebagaimana di maksud dilakukan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Menurut Naasir, metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya penelitian ini adalah :

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

⁶ <http://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pilih dalam penulisan karya penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif, dimana dalam penulisan Normatif dibutuhkan sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode Normatif, penulis bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam penulisan karya penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer yang digunakan untuk penulisan karya penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 4) Undang- Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

- 6) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/II/2009 tentang Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- 7) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005 tentang struktur organisasi Oditurat Militer

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan karya penelitian ini berasal dari buku-buku, majalah, surat kabar, internet serta dokumen-dokumen lain yang penulis anggap mempunyai data yang relevan yang dapat membantu dalam penulisan.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Data-data yang diperoleh dalam penyusunan karya penelitian ini di dapat dari mencari referensi dari buku-buku, majalah, surat kabar, internet serta dokumen-dokumen lain yang penulis anggap mempunyai data yang relevan yang dapat membantu dalam penulisan.

Disamping itu di dapat pula dari pendapat para ahli, hakim, maupun sarjana yang berkompeten dalam perkara yang khususnya bergerak di bidang peradilan militer.

b. Narasumber

Penelitian melakukan wawancara kepada narasumber yang dianggap mampu memberikan keterangan yang dapat membantu dalam penyusunan karya penelitian ini. Narasumber tersebut adalah bapak Ahmad Asmadi Kapt CHK dari Oditurat Militer II/11 Yogyakarta.

c. Analisis data

1) Bahan hukum primer

Di dalam menganalisis data dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan lain penulis mencari data yang relevan dengan topik yang di bahas dalam karya penulisan ini kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur topik tersebut.

2) Bahan hukum sekunder

Di dalam menganalisis data dari bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku baik buku secara fisik maupun bahan bacaan yang terdapat di dalam internet atau website, penulis mencari dan membandingkan bahan-bahan tersebut yang sesuai dengan topik pembahasan karya penulisan.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan dengan topik pembahasan yang terdapat dalam karya penelitian ini Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) dan Oditurat Militer (Odmil) dalam Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri dari :

a. BAB I

Di dalam BAB ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, dan metode penelitian.

b. BAB II

Di dalam bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan yang terdapat di dalam tinjauan mengenai hubungan antara Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (BABINKUM TNI) dan Oditurat Militer (ODMIL) dalam Penanganan Perkara Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

c. BAB III

BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di salam karya penulisan ini.

